

LAMPIRAN

1. Daftar transaksi pembelian barang / jasa yang dibeli oleh PT Harum Melati

9. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen Wajib Pajak terkait koreksi Pemeriksa yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Koreksi Pemeriksa tersebut terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP di tempat lain di daerah pabean yang seluruhnya menggunakan Kode Transaksi dengan jumlah PPN sebesar Rp73.997.273,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa 26 (dua puluh enam) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP ditempatkan di dalam daerah pabean yang terdapat pemasukan barang ke Kawasan Berikat (bukan barang konsumsi) sebagai berikut:

No.	Nomor/Tanggal Faktur Pajak	PKP Penjual / NPWP	PPN (Rp)	Nama Barang
1.	010.009-17.05586517 13/04/2017	PT.CW 02.xxx.██████████.000	800.000	Paper Barcode
2.	010.009-17.05586522 07/05/2017	PT.CW 02.xxx.██████████.000	36364.000	Computer Sale, Notebook, Hardware SSD, Monitor LG
3.	010.009-17.05586523 07/05/2017	PT.CW 02.xxx.██████████.000	3770.000	Teleconference CTS-SX10N-K9, CON-SNT-CTSS
4.	010.001-17.51448976 13/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.15.000	593.000	Flashdisk Batarray CR 2016, Card Reader, Laser Mesin dll
5.	010.001-17.51448977 13/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.15.000	148.600	Kertas Continuous 4 Ply, Kertas Continuous 3 Ply
6.	010.001-17.51448978 13/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	892.000	Kulkas Merk Panasonic, Dispenser Merk Sanden
7.	010.017-17.38557301 17/05/2017	PT.KI 31.xxx.██████████.000	9.105.525	Locker 18 Doors Blue
8.	010.001-17.51448979 18/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	450.750	Isi Ulang C02, Pylox Paint, Lakban Double Tape, Plastik
9.	010.001-17.51448980 18/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	1.197.700	Buku Tulis Sidu, Buku Batik, Bolpoint, Binder Clip, Staper
10.	010.001-17.51448981 18/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	763.500	File Cabinet, Papan Clipboard, MicroSD 16GB
11.	010.001-17.51448982 18/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	1.804.300	Gas Freon Coupler Angin, Busa Sponat, Selang Flexibel,
12.	010.001-17.50483901 19/05/2017	CVCS 01.xxx.██████████.000	2.293.700	Baut Tanam, Ring, Wing Nut, Acrylic Laquer Paint "Saporo",
13.	010.001-17.50483902 19/05/2017	CVCS 01.xxx.██████████.000	200.000	Monitor Dell
14.	010.001-17.50483903 19/05/2017	CVCS 01.xxx.██████████.000	375.000	Aseton, Pompa Oli
15.	010.001-17.51448983 29/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.15.000	1.292.000	Tempat Sampah, Mesin Penghancur Kertas
16.	010.001-17.51448984 29/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	90.000	HP Android, Lenovo A1000, RAM 1GB, ROM 8GB
17.	010.001-17.51448985 29/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.15.000	1.326.000	Isi Ulang 02, Coupler Angin, Exit Lamp, dll
18.	010.001-17.51448986 29/05/2017	CV.R 02.xxx.██████████.000	90.000	HP Android, Lenovo A1000, RAM 1GB, ROM 8GB
19.	011.018-17.74091235 31/05/2017	CV.Per 72.xxx.██████████.4.000	2.700.000	Rambu Lalu Lintas
20.	010.008-17.98126892 03/05/2017	PT.Nak 75.xxx.██████████.13.000	245.000	Pengerjaan Lobby Led Light 15 Watt
21.	010.017-17.89271829 03/05/2017	PT.No 01.xxx.██████████.1.000	156.954	Gasket Fuel Filter, Filter Oli, TMO Syntetic LT, dll
22.	010.018-17.53346055 15/05/2017	PT.BS 81.xxx.██████████.05.000	1.440.000	Rental Printer, Kelebihan Pakai (Kertas) Bulan April
23.	010.001-17.50266588 31/05/2017	CV.MJ 72.xxx.██████████.000	327.080	Sewa mesin foto copy, kelebihan kertas copy
24.	010.018-17.30084006 31/05/2017	CV.AP 76.xxx.██████████.000	325.000	Drum Pertamina (Second), Baya Transportasi
25.	011.018-17.30084004 31/05/2017	CV.AP 76.xxx.██████████.4.000	2.200.000	Material Pintu Gudang, Garbage, Tenaga
26.	011.018-17.30084005 31/05/2017	CV.AP 76.xxx.██████████.000	3.223.040	Pompa Water Booster 2HP, Ppa HOPE 2" Galian Tanah
Jumlah			72.173.149	

- 2) Terdapat 7 (tujuh) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP di tempat lain dalam daerah pabean atas penyerahan jasa kenapajak ke Kawasan Berikat sebagai berikut:

No	Nomor/Tanggal Faktur Pajak	PKP Penjual/NPWP	PPN (Rp)	Nama Jasa Kena Pajak
1	010.001-17.30351794 02/05/2017	PT.NF 01 xxx [REDACTED] 000	96.305	FCR Fee, CFS Charge (Export), eVGM Fee
2	010.009-17.07487269 02/05/2017	PT. Dharma 02. xxx [REDACTED] 000	350.000	Sertifikasi Gensel
3	010.001-17.50483899 16/05/2017	CV. Cand Songo 01. xxx [REDACTED] 000	190.000	Perbaikan Rail Kontainer Sampah
4	010.018-17.62030260 16/05/2017	PT.NF 01 xxx [REDACTED] 000	68.260	Origin Receiving Charges
5	201705E0438 20/05/2017	PT.TI 01 xxx [REDACTED] 000	950.000	Tagihan Telepon Bulan Mei 2017
6	010.018-17.62032385 24/05/2017	PT.NF 01 xxx [REDACTED] 000	67.027	Late Documentation Fee
7	010.018-17.62033604 31/05/2017	PT.NF 01 xxx [REDACTED] 000	102.532	Origin Receiving Charges
Jumlah			1.824.124	

- b. Bahwa koreksi Pemeriksa sebesar Rp 72.173.149,00 dapat dipertahankan karena 26 (dua puluh enam) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP di tempat lain dalam daerah pabean terkait pemasukan barang ke Kawasan Berikat:
- 1) seharusnya tidak pungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015.
 - 2) merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap karena tidak dibuat dengan benar menggunakan Kode Transaksi 07 sehingga PPN-nya tidak dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.
- c. Bahwa koreksi Pemeriksa sebesar Rp. 1.824.124 tidak dapat dipertahankan karena 7 (tujuh) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP di tempat lain dalam daerah pabean terkait penyerahan jasa kenapajak dalam ke, atau dari Kawasan Berikat:
- 1) telah pungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015.
 - 2) telah diterbitkan Faktur Pajak menggunakan Kode Transaksi 01 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.
 - 3) mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN.
 - 4) telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN.

3. Surat Keputusan Pajak yang Disetujui

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR.

PERTAMA : 1. Mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor [REDAKSI] tanggal 02 Juli 2018.
2. Menambah jumlah pajak yang lebih dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar nomor [REDAKSI] tanggal 04 Juni 2018 Masa Pajak Mei 2017.

atas
Wajib Pajak PT. XXX
NPWP [REDAKSI]
Alamat Jl. Raya

a
dengan perincian sebagai berikut.

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Lebih Bayar	1.173.909.523	1.824.124	1.175.733.647
b. Sanksi Sunga	0	0	0
c. Sanksi Kenaikan	0	0	0
d. Jumlah PPN yang lebih dibayar	1.173.909.523	1.824.124	1.175.733.647

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan PT. XXX
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
4. Kepala KPP Pratama XXX

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2019

an. Direktur Jenderal Pajak



9.4% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #10767840

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pungutan yang bersifat wajib bagi rakyat Indonesia berdasarkan undang-undang yang ada. Pajak adalah komponen penting dalam sebuah negara, karena pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membangun negara menuju arah yang lebih baik. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia sebagian besar berasal dari penarikan pajak, tanpa pajak kegiatan pembangunan negara akan sulit dilakukan. Pembangunan sarana umum, infrastruktur, biaya pendidikan dan kesehatan, subsidi BBM dan gaji pegawai negeri semua biaya bersumber dari pajak. Ketika pajak yang dipungut semakin banyak maka berdampak juga pada infrastruktur dan fasilitas yang dibangun akan semakin banyak juga. Dalam perpajakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat sedangkan Pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah PPN (pajak pertambahan nilai), pajak ini dikenakan saat terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang sudah ditetapkan menjadi PKP (pengusaha kena pajak) di dalam